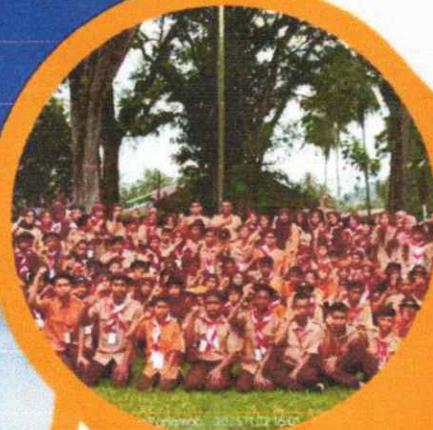
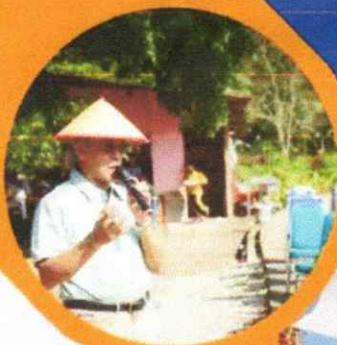




PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN



(LKJIP)
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



disdikbud@padangpariaman.go.id

<http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Seiring dengan komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kami dengan bangga menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2024.

LAKIP menjadi sebuah dokumen yang memuat evaluasi kinerja dan pencapaian OPD dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode tertentu. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan pencapaian, tetapi juga memperlihatkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui LAKIP ini, kami berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja OPD selama periode yang bersangkutan. Kami menyajikan data, analisis, dan narasi yang komprehensif guna memberikan pemahaman yang mendalam kepada para stakeholder mengenai capaian, hambatan, serta prospek yang dihadapi OPD.

Selanjutnya, kami juga mengajak semua pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang terdapat dalam LAKIP ini. Dengan demikian, kami yakin bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman akan semakin mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.

Terakhir, kami berharap agar LAKIP ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kinerja OPD. Semoga upaya kita bersama akan terus menghasilkan perubahan positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah kata pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Parit Malintang, 10 Februari 2024
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman**

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 19670210198903 1 007



DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
BAB.I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama	5
C. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
B. Realisasi Anggaran	43
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
D. Inovasi	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Langkah ke depan	65

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen ini terdapat gambaran menyeluruh tentang kinerja dan pencapaian Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam menjalankan amanah pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman ikut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan terutama di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

LAKIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

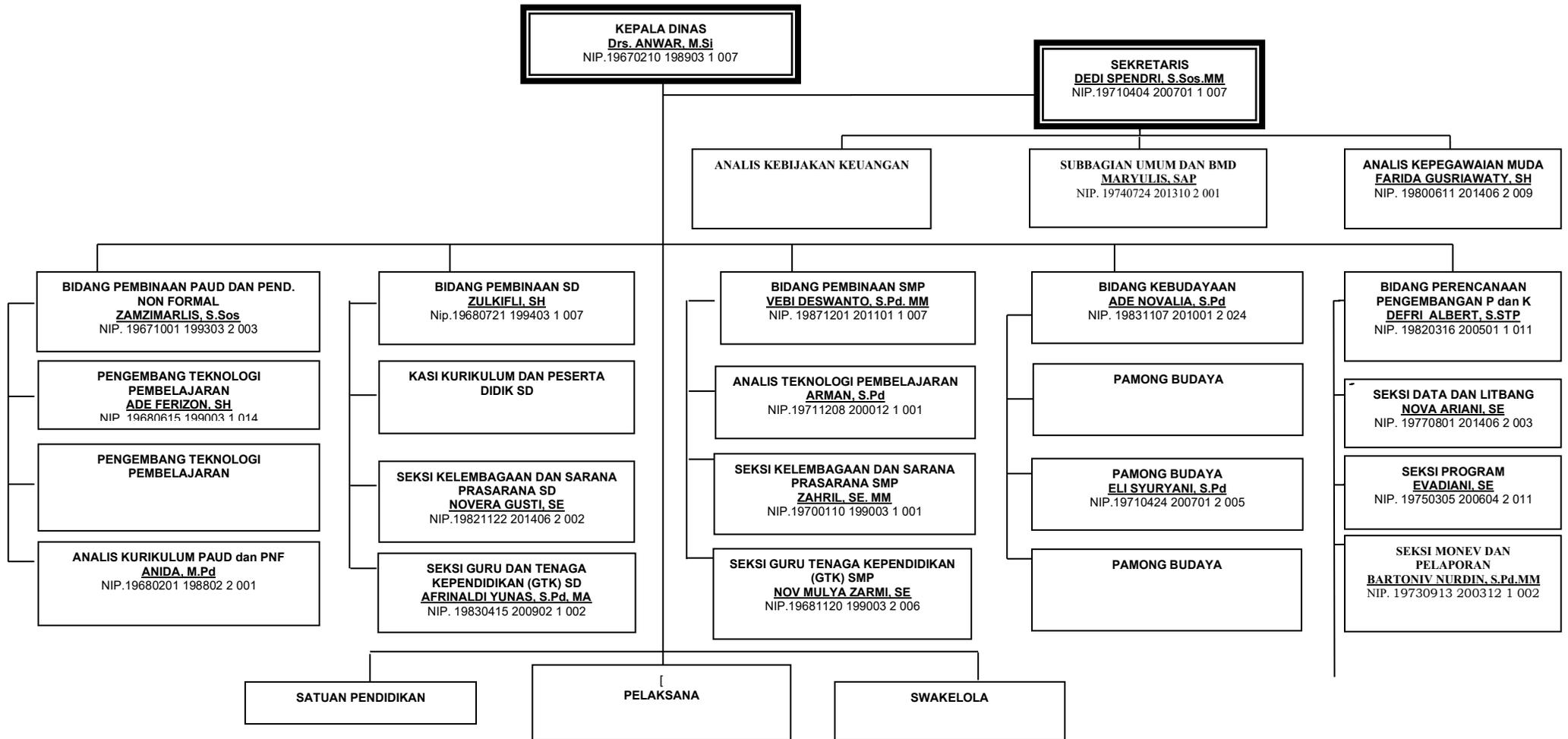
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengampu 2 (dua) urusan, yaitu urusan pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan kebudayaan yang merupakan urusan pilihan yang artinya merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan sehingga daerah memiliki otonomi untuk mengelola kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Meskipun tidak termasuk dalam urusan wajib, urusan kebudayaan sering kali dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan daerah dan pemeliharaan identitas budaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas ini adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja yang berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 4693/Disdik/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026.

1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN



2. Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
 - 2) Perumusan kebijakan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 3) Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
 - 4) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - 6) Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - 7) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - 8) Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
 - 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

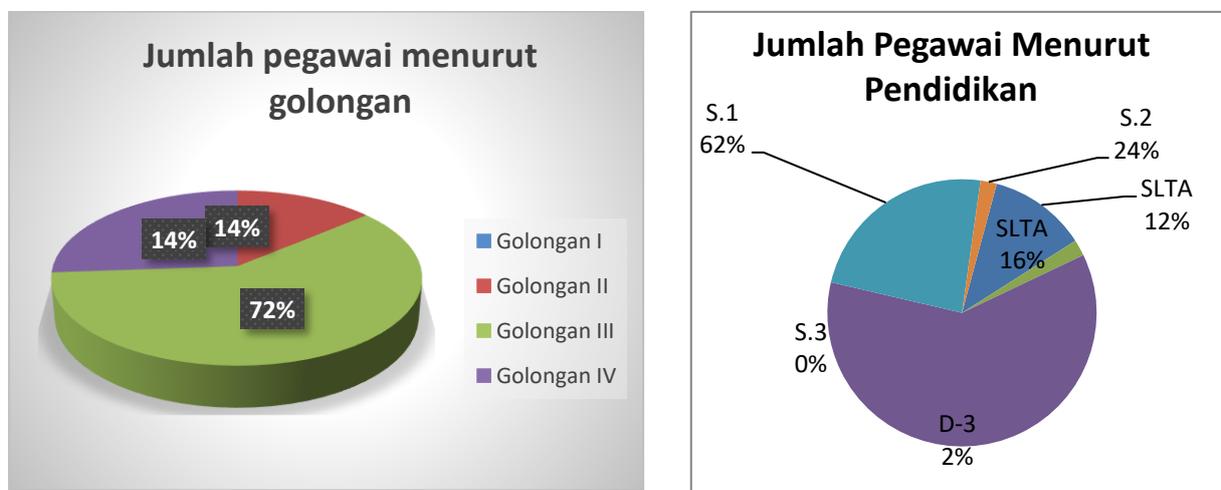
Tabel 1.1

Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jumlah Pegawai Menurut (orang)				Eselonering (orang)		Ket.
	Golongan		Pendidikan				
1	II	7	SLTA	6	II	1	
2	III	36	D-2	-	III	6	
3	IV	7	D-3	1	IV	6	
4			S.1	31	Fungsional	6	
5			S.2	11			
6			S.3	1			
	Jumlah	50					

Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gambar 1.1
Diagram Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Pendidikan



Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis diantaranya :

1. Pemerataan akses Pendidikan
 - a. Menambah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah/Madrasah Baru
 - b. Memperbaiki, rehabilitasi dan merevitalisasi fasilitas pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Prasekolah.
 - c. Melaksanakan penjangkaran anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk kedalam sistem pendidikan.non formal
 - d. Melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada diluar sistem sekolah, baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender.
2. Peningkatan mutu pendidik
 - a. Meningkatkan persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
 - b. Melakukan rekrutmen guru sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.
 - c. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru.

- d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Manajemen Guru Mata Pelajaran
 - e. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah dan lembaga pendidikan lainnya
 - f. Mengikuti program Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, Guru Penggerak
3. Peningkatan Mutu Peserta Didik
- a. Menyediakan buku pelajaran pokok dan alat peraga belajar secara memadai
 - b. Melanjutkan program beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu
 - c. Menyediakan dana untuk lomba – lomba di tingkat Kabupaten.
 - d. Menyediakan dana untuk mengirim lomba tingkat propinsi, ini juga tidak terlaksana
4. Meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- a. Menyediakan Dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
 - b. Melakukan penambahan fasilitas fungsional seperti ruang perpustakaan, ruang olahraga, ruang laboratorium dan pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan sarana / peralatan pendukungnya.
 - c. Menyediakan dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses Pembelajaran yang berkualitas.
 - d. Memperluas dan memantapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Masyarakat (MBS) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Prasekolah

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024, menguraikan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistematika Pelaporan

Bab II	Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 mulai dari Kepala Dinas dengan Bupati sampai ke Perjanjian Kinerja Staf dengan atasannya
Bab III.	<p>Akuntabilitas Kinerja</p> <p>A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Menyajikan capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; <p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>
Bab IV	Penutup

	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerjanya.
--	---

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja.
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021- 2026 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2024, Dan menetapkannya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target-target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2024.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

A. RENCANA SRATEGIS

Rencana strategis adalah dokumen yang menguraikan tujuan, dan strategi jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Adapun visi daerah yang akan dicapai adalah **"Kabupaten Padang Pariaman Berjaya"** Ini adalah panduan yang merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian pada misi ke 1, 4, dan 5 daerah tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi ke-1 : Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakat
2. Misi ke-4 : Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan
3. Misi ke-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan
Misi 4 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Terampil Serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal					
1	Peningkatan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan	Angka partisipasi murni (APM) SD	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun x 100
				Angka partisipasi murni (APM) SMP	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun x 100
		Harapan Lama Sekolah		Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat / penduduk usia sekolah di jenjang tersebut x 100
				Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan	Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan pendidikan x 100%
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh guru x 100%				
MISI 1: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban					
2	Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	meningkatnya perlindungan warisan budaya.	Persentase cagar budaya yang dilindungi	Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) / jumlah cagar budaya yang terdata
				Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan

Paraf Verifikasi

Ka. Bapelitbangoda

Inspektur

Kabag Organisasi

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dahis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/6/24		30/6/24		30/6/24	

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan					
3	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Padang Pariaman tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 termasuk untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Target
1	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan	Angka partisipasi murni (APM) SD	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun x 100	100
		Angka partisipasi murni (APM) SMP	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun x 100	80
		Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat: penduduk usia sekolah di jenjang tersebut x 100	65
		Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan	Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan Pendidikan x 100	85
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh guru x 100	97
2	meningkatnya perlindungan warisan budaya .	Persentase cagar budaya yang dilindungi	Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) / jumlah cagar budaya yang terdata x 100	90
		Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan x 100	55
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	A (80,01)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. *Untuk Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan..

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi Target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara keputusan kepala LAN dan Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud dengan pengukuran dengan skala Ordinal yaitu :

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤ 100	Berhasil
80 < s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

1. Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024 :

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2024		%	Predikat
							Target	Realisasi		
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Terampil Serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal										
1	Peningkatan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan	Angka partisipasi murni (APM) SD	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun x 100	Angka	100	99,5	99,5	Berhasil
				Angka partisipasi murni (APM) SMP	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun x 100	Angka	80	82,13	102,6	Sangat Berhasil
				Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat: penduduk usia sekolah di jenjang tersebut x 100	Angka	65	39,33	60,50	Tidak Berhasil
		Harapan Lama Sekolah		Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan	Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan Pendidikan x 100	%	85	91,89	108,1	Sangat Berhasil
				Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh guru x 100	%	97	84,81	87,43	Cukup Berhasil

MISI 1: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban										
2	Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	meningkatnya perlindungan warisan budaya .	Persentase cagar budaya yang dilindungi	Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) / jumlah cagar budaya yang terdata x 100	%	90	87,91	97,7	Sangat Berhasil
				Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan x 100	%	55	100	181,8	Sangat Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan										
3	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntable	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Predikat	A (80,01)	BB (74,35)	92,93	Berhasil



Sasaran 1 :

Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan merupakan sasaran strategis yang terkait dengan urusan pendidikan dengan 5 indikator sasaran yaitu Angka partisipasi murni (APM) SD, Angka partisipasi murni (APM) SMP, Angka partisipasi kasar (APK) PAUD, Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan dan Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Predikat
1	Angka partisipasi murni (APM) SD	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun x 100	100	99,5	99,5	Berhasil
2	Angka partisipasi murni (APM) SMP	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun x 100	80	82,13	102,6	Sangat Berhasil
3	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat: penduduk usia sekolah di jenjang tersebut x 100	65	39,33	60,50	Tidak Berhasil

4	Persentase satuan pendidikan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan	Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan Pendidikan x 100%	85	91,89	108,1	Sangat Berhasil
5	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh gurux 100%	97	84,81	87,43	Cukup Berhasil

Dari tabel capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan tersebut dapat diuraikan masing-masing capaian indikator sebagai berikut:

1. Angka partisipasi murni (APM) SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang Pendidikan dengan usia yang sesuai dan dinyatakan dalam angka. Capaian APM SD/MI/Paket A tahun 2024 adalah 99,5 lebih tinggi 4,54 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

Rumus Penghitungan : Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun

- Jumlah siswa 7-12 tahun = 47.574
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun = 47.813
- $APM = 47.574 : 47.813 \times 100 = 99,5$

Persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 99,5% dengan predikat berhasil. Namun, walaupun demikian, masih terdapat selisih usia 7-12 tahun yang tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah SD/MI/Paket A.



Foto 3.1

Ket : Kegiatan monitoring Proses Belajar Mengajar (PBM) di satuan pendidikan sekolah dasar

2. Angka partisipasi murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang Pendidikan dengan usia yang sesuai dan dinyatakan dalam angka. Capaian APM SMP tahun 2024 adalah 82,13 lebih tinggi 2,13 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 dengan perhitungan sebagai berikut :

Rumus Penghitungan : Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun

- Jumlah siswa 13-15 tahun = 21.086
- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun = 25.674
- $APM = 21.086 : 25.674 \times 100 = 82,13$

Persentase capaian kinerja ini 102,6% dari target yang ditetapkan dengan predikat cukup berhasil. Namun, walaupun demikian, masih terdapat selisih usia 13-15 tahun yang tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah SMP sederajat.



Foto 3.2

Ket : Kegiatan pembinaan kemampuan akademik dan bakat siswa di satuan Pendidikan menengah pertama.

3. Angka partisipasi kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut). Capaian APK PAUD tahun 2024 adalah 39,33 lebih rendah 25,67 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 65 dengan perhitungan sebagai berikut :

Rumus Penghitungan : Jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun

- Jumlah siswa 3-6 tahun = 11.260
- Jumlah penduduk usia 3-6 tahun = 28.629
- APK PAUD = $11.260 : 28.629 \times 100 = 39,33$



Foto 3.3

Ket : Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) di satuan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan

Sarana prasarana merupakan aspek yang penting dalam proses peningkatan kinerja pendidikan. Pada tahun 2024 jumlah SD sederajat adalah 419 unit dan tingkat Satuan Pendidikan SMP adalah 62 unit sehingga untuk satuan pendidikan dasar total jumlahnya adalah 481 unit.

Sarana prasarana merupakan aspek yang penting dalam proses peningkatan kinerja pendidikan. Pada tahun 2024 jumlah SD sederajat adalah 419 unit dan tingkat Satuan Pendidikan SMP adalah 62 unit sehingga untuk satuan pendidikan dasar total jumlahnya adalah 481 unit.

Rumus Penghitungan : Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan pendidikan x 100

Capaian kinerja ini di tahun 2024 lebih tinggi 6,89 dari target yang ditetapkan awal sebesar 85 menjadi 91,89 dengan perhitungan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik = 426 unit
- total satuan pendidikan = 481 unit (SD dan SMP)
- Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan = $426 \text{ unit} : 481 \text{ unit} \times 100 = 91,89$.



Foto 3.4

Ket : kegiatan penyediaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan

5. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/D4

Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing serta mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan S1/DIV.

Pada saat ini sesuai dengan dalam publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 jumlah guru sesuai dengan tingkatan adalah sebagai berikut : guru PAUD sebanyak 646 orang, guru RA sebanyak 1.125 orang, guru SD sebanyak 3.628 orang, guru MI sebanyak 132 orang, guru SMP sebanyak 1.207 orang dan MTsN sebanyak 585 orang dengan total sebanyak 7.323 orang. Namun sesuai dengan data yang menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan hanya sebanyak 4.097 orang PNS, dan selebihnya terdiri dari tenaga honor, atau kewenangan instansi vertikal sederajat.

Rumus Penghitungan : Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh guru x 100

Sementara itu, dari 7.323 orang guru yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten se-Kabupaten Padang Pariaman memenuhi kualifikasi S1/D4 hanya 6.211 orang.

- Guru kualifikasi S1/DIV = 6.211
- Total guru = 7.323
- Guru S1/DIV = $6.211 : 7.323 \times 100\% = 84,81$

Persentase keberhasilan kinerja ini adalah 87,43% dari target yang ditetapkan dengan kurang berhasil karena target dari kinerja ini adalah 97% sedangkan hanya terpenuhi sebesar 84,81%.



Foto 3.5

Ket : Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2023		Realisasi Kinerja	Kinerja 2024		Realisasi Kinerja	interpretasi
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Angka partisipasi murni (APM) SD	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun x 100	Angka	94,86	99,15	104%	100	99,5	99,5	Berhasil
2	Angka partisipasi	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat	Angka	63,5	78,22	123%	80	82,13	102	Berhasil

	murni (APM) SMP	SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun x 100								
3	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat: penduduk usia sekolah di jenjang tersebut x 100	Angka	54,8	61	111%	65	39,33	60,50%	Kurang Berhasil
4	Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan	Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan Pendidikan x 100	%	84	87	104%	85	91,89	108	Sangat Berhasil
5	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh guru x 100	%	94	92	98%	97	84,81	87	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan mengalami Peningkatan dan penurunan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024 diantaranya :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD mengalami peningkatan capaian sebesar 0.35%. peningkatan tersebut dikarenakan :
 - a) Ketepatan usia peserta didik dalam memperoleh Pendidikan usia 7 pada awal memasuki jenjang Pendidikan SD.
 - b) Adanya peningkatan akses Pendidikan yang dapat mendukung warga usia sekolah dapat memperoleh Pendidikan dengan akses dan jarak yang tidak terlalu jauh serta sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.
 - c) Adanya inovasi dari satuan Pendidikan dengan memberikan program unggulan seperti tahfiz dan Pendidikan berbasis islami yang memberikan nilai tambah dalam Pendidikan dasar.
 - d) Adanya bantuan pembiayaan Pendidikan dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh peserta didik sekolah dasar.
 - e) Adanya bantuan pembiayaan yang diperuntukan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui

- program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya putus sekolah dan dapat memastikan siswa yang kurang mampu dapat terus memperoleh Pendidikan.
- f) Adanya pemahaman dan Kesadaran akan pentingnya Pendidikan Dasar oleh orang tua siswa sehingga dapat mendorong dan mendukung anaknya agar dapat memperoleh pendidikan.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP mengalami peningkatan capaian sebesar 4%. Adanya peningkatan capaian tersebut dikarenakan oleh :
- Memastikan untuk peserta didik di jenjang SD agar dapat menyelesaikan Pendidikan saat berumur 12 tahun.
 - Pemerataan Akses Pendidikan dengan memastikan kondisi akses jalan yang bagus dan satuan pendidikan yang tidak terlalu jauh domisili peserta didik.
 - Meningkatkan mutu Pendidikan dengan pemenuhan 8 Standar pendidikan agar menghasilkan Pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang memilih bersekolah ke daerah lain dengan asumsi bahwa Pendidikan di daerah lain lebih bermutu
 - Melakukan intervensi dan memberikan atensi kepada peserta didik yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan mendapatkan akses bantuan Pendidikan dari pemerintah pusat berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah berupa BOSDA.
 - Memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap orang tua mengenai pentingnya Pendidikan
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami penurunan capaian di tahun 2024 sebesar 21,7% dibanding tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu rendah kesadaran orang tua siswa akan pentingnya Pendidikan PAUD dan masih belum meratanya keberadaan satuan PAUD di daerah khususnya di Tingkat Korong.
4. Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan mengalami peningkatan capaian di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5%. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :
- Peningkatan Infrastruktur Fisik: Membangun dan memperbaiki gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, dan fasilitas lainnya yang mendukung pembelajaran.
 - Aksesibilitas: Memastikan bahwa sekolah mudah diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah terpencil.

- c) Fasilitas penunjang : menyediakan fasilitas tambahan seperti lapangan olahraga, taman bermain, dan kantin yang bersih dan aman.
- d) Pemeliharaan Rutin: Melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap semua fasilitas sekolah untuk memastikan keberlangsungan dan kualitasnya.
5. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami penurunan capaian di tahun 2024 sebesar 7% dibanding tahun 2024. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang S1/D4, serta belum optimalnya minat guru melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	94,67	94,77	94,86	94,96	61,95	87	99,15	99,5
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	60,9	63,5	66,2	69	84	77,3	78,22	82,13
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	52.5	54.8	57.2	59.7	56	52,6	61	39,33

Sekolah SD kondisi bangunan baik	%	95,5	96	97	98	54,14	54	98	95
Sekolah SMP kondisi bangunan baik	%	82	84	86	90	77,47	77,5	81	90
Guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/DIV	%	92.8	94.2	95.6	97.1	92,4	92,4	92,42	97

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan mengalami Peningkatan dan penurunan capaian dari tahun 2021 sampai 2024 diantaranya :

1. Angka Partispasi Murni (APM) SD tidak memenuhi target pada tahun 2021 dan 2022, sementara tahun 2023 dan tahun 2024 target tersebut tercapai.
2. Angka Partispasi Murni (APM) SMP telah memenuhi target RPJMD dari tahun 2021 sampai 2024
3. Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD telah memenuhi target RPJMD dari tahun 2021 dan 2023 sementara pada tahun 2022 dan 2024 tidak memenuhi target RPJMD.
4. Guru yang memenenuhi kualifikasi Pendidikan S1/DIV tidak memenuhi target RPJMD dari tahun 2021 sampai 2024.

d. Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat meningkatnya pemerataan layanan pendidikan, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya;

Terbatasnya alokasi anggaran dan infrastruktur pendukung dapat pada sebagian besar sekolah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah-sekolah di daerah pelosok sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai, termasuk buku teks, laboratorium, dan fasilitas olahraga, sanitasi dan lain sebagainya.

b. Ketidaksetaraan Akses;

Masih terdapat kesenjangan akses di beberapa sekolah, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Faktor-faktor seperti jarak, transportasi, dan pendapatan ekonomi masyarakat masih menghantui peningkatan mutu dari kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.

c. Kurang meratanya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas;

Di beberapa sekolah, terutama daerah yang jauh dari pusat kecamatan, masih didapati adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum mampu untuk mengadopsi mekanisme pendidikan yang terbaru dan terbarukan, sehingga proses pembelajaran masih monoton dan kurang inovatif dalam menerapkan perkembangan teknologi dan informatika.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Masih adanya budaya lokal, norma-norma sosial, dan stigma terhadap pendidikan tertentu di beberapa daerah sehingga menghambat partisipasi dan pemerataan pendidikan terutama bagi kelompok-kelompok merasa minoritas atau marginal.

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografisnya, memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan berkualitas. Pemerataan layanan pendidikan dapat membawa berbagai manfaat, termasuk :

- a. Kesetaraan dan Keadilan Pemerataan layanan pendidikan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Ini membantu menanggulangi ketidaksetaraan pendidikan yang sering kali menjadi akar ketidaksetaraan sosial yang lebih besar.
- b. Peningkatan Aksesibilitas Dengan memastikan pendidikan berkualitas tersedia di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan pedesaan, pemerataan layanan pendidikan membuka pintu bagi individu yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan.

- c. Peningkatan Kualitas Hidup Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi. Dengan memperluas akses ke pendidikan berkualitas, pemerataan layanan pendidikan membantu memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam kehidupan.
- d. Pengurangan Ketimpangan Pemerataan layanan pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua individu dalam mengakses sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk kemajuan mereka.
- e. Pembangunan Berkelanjutan Investasi dalam pendidikan yang merata merupakan langkah penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan membangun fondasi pendidikan yang kuat bagi semua anggota masyarakat, pemerataan layanan pendidikan membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.

Untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan, diperlukan langkah-langkah seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, program beasiswa atau bantuan keuangan untuk keluarga yang membutuhkan, pengembangan kurikulum yang inklusif, pelatihan guru yang memadai, dan perencanaan kebijakan yang berfokus pada keadilan pendidikan. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan dapat berperan dalam mendorong pemerataan layanan pendidikan.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 :

No	sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan	APM SD	99,5	95,54	5%
		APM SMP	102,6	97,70	4,9
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60,50	96,87	36,37
		Guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/DIV	87,43	97,91	14,6%

Dengan perhitungan :

- a. APM Paud : Efisiensi capaian kinerja : $100\% - 99,5\% = 0,5\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 95,54 = 4,46\%$ sehingga tingkat efisiensi 5%

- b. APM SMP : Efisiensi capaian kinerja : $102,6\% - 100\% = 2,6\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 97,70 = 2,3\%$ sehingga tingkat efisiensi 4,9%.
- c. APK PAUD : Efisiensi capaian kinerja : $60,50\% - 100\% = -39,5\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 96,87 = 3,13\%$ sehingga tingkat efisiensi -36.37%.
- d. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 : Efisiensi capaian kinerja : $87,43\% - 100\% = 12,57\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 97,91 = 2,09\%$ sehingga tingkat efisiensi 14,6%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan Program dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan berupa

- Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar sebesar Rp. 57.354.162.125,-
- Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Sebesar Rp. 24.853.214.298,-
- Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini Sebesar Rp.9.486.332.714,-
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp.1.343.396.037,-
- Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebesar Rp.471.439.182,-



Sasaran 2:

Meningkatnya perlindungan warisan budaya.

Meningkatnya perlindungan warisan budaya menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berlangsung. Warisan budaya mencakup segala sesuatu mulai dari bangunan bersejarah, artefak budaya, tradisi, kepercayaan, bahasa, tarian, musik, hingga pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Ada beberapa alasan mengapa perlindungan warisan budaya sangat penting :

- a. Identitas dan Kepentingan Budaya. Warisan budaya mencerminkan identitas suatu masyarakat atau kelompok. Perlindungan warisan budaya memungkinkan

masyarakat untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka, meningkatkan rasa kebanggaan dan kohesi sosial.

- b. Pendidikan dan Pengetahuan. Warisan budaya adalah sumber pengetahuan yang tak ternilai tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Perlindungan warisan budaya memungkinkan pengetahuan ini dijaga dan disampaikan kepada generasi mendatang.
- c. Pariwisata dan Ekonom. Banyak warisan budaya memiliki nilai pariwisata yang signifikan. Perlindungan warisan budaya dapat menjadi daya tarik wisata yang penting, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata dan industri kreatif.
- d. Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan. Perlindungan warisan budaya sering kali terkait dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Misalnya, bangunan bersejarah yang dipertahankan dengan baik dapat menjadi contoh arsitektur yang ramah lingkungan dan mempromosikan praktik keberlanjutan.
- e. Memperkuat Dialog Antarbudaya. Warisan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat dialog antarbudaya dan saling pengertian antara masyarakat yang berbeda. Perlindungan warisan budaya dapat membantu membangun jembatan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya.

Untuk meningkatkan perlindungan warisan budaya, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Ini termasuk langkah-langkah seperti dokumentasi, restorasi, promosi, pendidikan, pembangunan kapasitas, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi meningkatnya perlindungan warisan budaya .Pendidikan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya perlindungan warisan budaya.	Persentase cagar budaya yang dilindungi	90	87,91	97,7	Berhasil

		Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	55	100	181,8	Sangat Berhasil
--	--	---	----	-----	-------	-----------------

Dari tabel capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya perlindungan warisan budaya tersebut dapat diuraikan masing-masing capaian indikator sebagai berikut:

2. Persentase cagar budaya yang dilindungi

Definisi cagar budaya yang dilindungi yang menjadi target kinerja dari urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah memiliki aspek hukum, regulasi, dan kebijakan perlindungan warisan budaya yang ada. Cagar budaya yang dilindungi dapat mencakup berbagai jenis :

- a. Situs Bersejarah: Tempat-tempat arkeologis, seperti reruntuhan kota kuno, makam kuno, atau situs prasejarah yang memiliki nilai sejarah yang penting.
- b. Bangunan Bersejarah: Struktur bangunan yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, atau keunikan budaya, seperti istana bersejarah, gereja-gereja kuno, atau bangunan kolonial.
- c. Artefak Budaya: Objek-objek seni, kerajinan, atau benda-benda sejarah yang memiliki nilai seni, keindahan, atau signifikansi budaya, seperti lukisan, patung, perabotan kuno, atau artefak-artefak arkeologis.
- d. Lanskap Budaya: Area-area yang memiliki nilai budaya atau sejarah yang penting, seperti lanskap budaya pertanian tradisional, situs-situs alam yang memiliki keunikan budaya, atau kawasan pelestarian alam yang memiliki nilai budaya yang tinggi.



Foto 3.6

Ket : Stasiun Parit Malintang tampak samping



Foto 3.7

Ket : bukit batu mejan (batu columnar joint) surantiah

Pada tahun 2024, Realisasi kinerja ini adalah 87,91% dari target 90% yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Rumus Penghitungan : Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi)/ jumlah cagar budaya yang terdata x 100

- Jumlah cagar budaya yang dilindungi = 80
- Jumlah cagar budaya yang terdata di tahun 2024 = 91
- Persentase cagar budaya yang dilindungi = $80 : 91 \times 100\% = 87,91 \%$

Predikat sangat berhasil. Namun, walaupun demikian, dengan keterbatasan SDM dan alokasi anggaran, masih banyak terdapat warisan budaya yang terdata dan terlindungi.

3. Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi

- 1) Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi adalah ukuran proporsi atau persentase dari total warisan budaya tak benda suatu wilayah atau negara yang secara resmi diakui dan dilindungi oleh pemerintah atau lembaga terkait dari kerusakan, kehilangan, atau perubahan yang merugikan.
- 2) Warisan budaya tak benda mencakup berbagai praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat. Contohnya termasuk tradisi lisan, pertunjukan

teater, tarian tradisional, teknik pertanian tradisional, dan praktik spiritual atau keagamaan.

- 3) Perlindungan terhadap warisan budaya tak benda biasanya melibatkan penetapan status khusus dan pengakuan resmi terhadap elemen-elemen ini sebagai bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Ini dapat dicapai melalui pembuatan undang-undang, regulasi, atau konvensi internasional, serta melalui pengakuan oleh lembaga-lembaga seperti UNESCO.
- 4) Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi mencerminkan seberapa banyak dari warisan budaya tersebut yang telah diidentifikasi, didokumentasikan, dan diberikan perlindungan hukum atau administratif yang sesuai. Hal ini dapat menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesadaran dan komitmen suatu negara terhadap pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya tak benda mereka.

Rumus Penghitungan : Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan x 100

Pada tahun 2024, Realisasi kinerja ini adalah 100% dari target 55% yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan = 2
- jumlah total warisan budaya yang ditetapkan = 2
- Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi = $2 : 2 \times 100\% = 100\%$.

Predikat sangat berhasil. Namun, walaupun demikian, dengan keterbatasan SDM dan alokasi anggaran, masih banyak terdapat warisan budaya tak benda yang terdata dan terlindungi.



Foto 3.8

Ket : warisan budaya tak benda (kegiatan batagak kudo-kudo)



b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Sasaran	Rumus Penghitungan	Satuan	Kinerja 2023		Realisasi Kinerja	Kinerja 2024		Realisasi Kinerja	interpretasi
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase cagar budaya yang dilindungi	Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) / jumlah cagar	%	86	85	99%	90	87,91	97,50%	Cukup Berhasil

		budaya yang terdata x 100								
2	Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan x 100	%	50	55	110%	55	100	181%	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan mengalami Peningkatan dan penurunan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024 diantaranya :

1. Persentase cagar budaya yang dilindungi mengalami peningkatan capaian ditahun 2024 sebesar 3% dibanding tahun 2023.
2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi mengalami peningkatan capaian di tahun 2024 sebesar 45% jika dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase cagar budaya yang dilindungi	%			94,86	94,96			99,15	99,5

Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	%			66,2	69			78,22	82,13
---	---	--	--	------	----	--	--	-------	-------

d. Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Untuk meningkatkan perlindungan warisan budaya , diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Ini termasuk langkah-langkah seperti dokumentasi, restorasi, promosi, pendidikan, pembangunan kapasitas, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan perlindungan warisan budaya antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
Banyak orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan warisan budaya atau tidak memahami cara untuk melakukannya dengan tepat.
- b. Kurangnya sumber daya;
Perlindungan warisan budaya membutuhkan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan SDM. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dominan dalam kurangnya upaya perlindungan warisan budaya ini.
- c. Perubahan sosial dan nilai-nilai budaya;
Perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai budaya dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap warisan budaya atau bahkan penolakan terhadap praktik pelestariannya.
- d. Pengabaian dan kurangnya perawatan:
Karena adanya beberapa situs-situs bersejarah dan warisan budaya lainnya terabaikan, sehingga ini dapat mengakibatkan kerusakan karena faktor alam dan aktifitas manusia.

Mengatasi penghambat-penghambat ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga internasional untuk meningkatkan

kesadaran, alokasi sumber daya, perlindungan hukum, dan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

Perlindungan terhadap cagar budaya yang dilindungi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengawasan, pemeliharaan, restorasi, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tetap bisa dilestarikan sehingga tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ini adalah :

- a. Pengakuan dan Pencatatan: Mengidentifikasi dan mencatat elemen-elemen warisan budaya tak benda yang penting melalui survei, penelitian, dan konsultasi dengan komunitas lokal dan para ahli budaya.
- b. Pengembangan Kebijakan Perlindungan: Membuat undang-undang, regulasi, atau kebijakan khusus untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda, serta menetapkan status khusus dan pengakuan resmi terhadap elemen-elemen ini.
- c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya warisan budaya tak benda, mempromosikan apresiasi terhadap tradisi dan praktik budaya mereka, serta meningkatkan kesadaran akan ancaman yang mungkin dihadapi oleh warisan ini.
- d. Partisipasi Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan memelihara tradisi mereka sendiri.
- e. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda, baik di kalangan generasi muda maupun anggota masyarakat secara umum.
- f. Kolaborasi Antar Pihak: Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda.
- g. Pendokumentasian dan Penelitian: Melakukan dokumentasi lengkap tentang elemen-elemen warisan budaya tak benda, termasuk pengumpulan cerita,

gambar, rekaman audio/video, dan data lainnya untuk keperluan penelitian dan pemeliharaan.

- h. Pengembangan Program Budaya dan Festival: Mengadakan acara-acara budaya dan festival untuk mempromosikan warisan budaya tak benda, serta memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan mereka.
- i. Penggunaan Teknologi dan Media: Memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk mempromosikan dan membagikan informasi tentang warisan budaya tak benda dengan lebih luas, serta untuk mendukung upaya dokumentasi dan pendidikan.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2 :

No	sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase cagar budaya yang dilindungi	Persentase cagar budaya yang dilindungi	97,7	99,31	3%
		Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	181,8	99,28	81%

Dengan perhitungan :

- a. Persentase cagar budaya yang dilindungi: Efisiensi capaian kinerja : $100\% - 97,7\% = 2,3\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 99,31 = 0,69\%$ sehingga tingkat efisiensi 3%
- b. Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi: Efisiensi capaian kinerja : $181\% - 100\% = 81\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 99,28 = 0,72\%$ sehingga tingkat efisiensi 81%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya perlindungan warisan budaya Pendidikan Program dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kebudayaan dengan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 57.184.939,00,- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 1.613.095.753,00 dan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota sebesar 319.832.766,00.
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 199.566.325,00,-
- Program Pembinaan Sejarah dengan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 69.460.100,00,-
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 190.166.524,00 dan kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 40.691.000,00.

	<p>Sasaran 3 :</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p>
---	---

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024

Tabel 3.9

Perbandingan Target dan Realisasi meningkatnya Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (80,01)	BB (74,35)	92,93	Berhasil

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan aspek penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mengacu pada kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2023		Kinerja 2024		interpretasi
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	%	A (80,01)	BB (74,05)	A (80,01)	BB (74,35)	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja hasil Penilaian evaluasi Sakip dari inspektorat mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 0,35 di banding tahun 2024. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan namun dapat mengindikasikan adanya perbaikan kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi serta sinkronisasi dari dokumen perencanaan.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target RPJMD

Indikator	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	%	BB	BB	A	A	B	B	BB	BB

Dari Tabel 3.10 diatas dapat dilihat bahwa Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mampu mencapai target dari tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan di RPJMD.

d. Analisis Faktor Pendukung /Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Sakip dari inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan :

- a. Penetapan Sasaran dan KPI Perangkat Daerah harus menetapkan sasaran yang jelas dan terukur serta indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk menilai pencapaian tujuan. Sasaran dan KPI harus dapat diukur secara objektif dan memungkinkan untuk pemantauan yang efektif.
- b. Transparansi Informasi ; Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang kinerja Perangkat Daerah, termasuk laporan kinerja, anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi. Ini dapat dilakukan melalui situs web resmi, forum publik, atau media sosial.
- c. Mekanisme Pengawasan; Membangun mekanisme pengawasan yang kuat, seperti badan pengawas atau komite independen, untuk memantau kinerja Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini harus memiliki kewenangan yang cukup dan mandiri untuk melakukan tugas pengawasan mereka.
- d. Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat; Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Ini dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.

- e. Penghargaan dan Sanksi; Menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas berdasarkan kinerja Perangkat Daerah. Ini dapat mencakup penghargaan untuk pencapaian yang baik dan sanksi untuk kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
- f. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai ; Memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinyu kepada pegawai Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat.
- g. Penerapan Teknologi Informasi ; Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, terutama terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3 :

No	sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi Sakip dari Inspektorat	92,93	95,73	11,34%

Dengan perhitungan :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah: Efisiensi capaian kinerja : $100\% - 92,93\% = 7,07\%$ dan Efisiensi penyerapan anggaran : $100\% - 95,73 = 4,27\%$ sehingga tingkat efisiensi 11,34%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.70.209.897,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.465.611.494.122,00,-
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.964.998,00,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 32.931.805,00,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 239.957.454,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 10.000.000,00,-

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Indikator kinerja
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	584.540.310.334,48	562.040.228.939,00	96%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	484.857.107.480,48	465.976.558.276,00	95,73%	
	Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.877.447,00	70.209.897,00	71.37%	Jumlah Data Sekolah Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Serta sara Prasarana Sekolah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.227.340,00	33.569.592,00	75.60%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.650.107,00	36.640.305,00	68.19%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	484.377.119.305,48	465.611.494.122,00	95.75%	Jumlah Penyediaan Gaji/Tunjangan/Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	483.515.939.305,48	464.757.114.122,00	95.74%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	861.180.000,00	854.380.000,00	99.21%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.444.998,00	11.964.998,00	88.99%	Rasio Penghitungan PAK Pelatihan Bimtek
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.050.000,00	7.570.000,00	83.65%	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.394.998,00	4.394.998,00	100.00%	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000,00	32.931.805,00	54.89%	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	-	0.00%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	5.687.000,00	56.87%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	27.244.805,00	68.11%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.600.000,00	-	0.00%	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin	11.600.000,00	-	0.00%	Jumlah Perlengkapan Peralatan dan Mesin yang Tersedia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.065.730,00	239.957.454,00	88.20%	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.600.000,00	17.573.000,00	85.31%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.905.104,00	31.812.462,00	86.20%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.560.626,00	190.571.992,00	88.82%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	66.67%	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.000.000,00	-	0.00%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100.00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Telah Direhabilitasi
Program Pengelolaan Pendidikan	96.617.789.876,00	93.037.105.174,00	95.97%	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.030.862.160,00	57.354.162.125,00	95.54%	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	259.117.397,00	208.617.134,00	80.51%	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	546.477.500,00	365.851.411,00	66.95%	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.701.200.000,00	1.692.281.692,00	99.48%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
Pengadaan Mebel Sekolah	355.000.000,00	354.028.409,00	99.73%	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia
Pengadaan perlengkapan Sekolah	150.000.000,00	148.560.000,00	99.04%	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	300.000.000,00		99.40%	

			298.200.000,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	133.507.900,00		130.143.050,00	97.48%	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.450.100.000,00		7.442.671.750,00	99.90%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	323.631.500,00		165.032.636,00	50.99%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	921.800.000,00		835.634.200,00	90.65%	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.467.400.000,00		40.867.882.248,00	96.23%	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.000.000,00		140.810.991,00	93.87%	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	692.144.135,00		519.001.156,00	74.98%	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	190.000.000,00		183.064.300,00	96.35%	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
Pembangunan Ruang Kelas Baru	870.000.000,00		866.677.819,00	99.62%	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	594.733.915,00		593.952.698,00	99.87%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	35000000		28.930.000,00	82.66%	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.890.749.813,00		2.512.822.631,00	86.93%	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.439.624.056,00		24.853.214.298,00	97.70%	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450.000.000,00		449.298.000,00	99.84%	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	467.913.104,00		466.745.200,00	99.75%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.193.691.599,00	2.049.391.920,00	93.42%	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	171.819.584,00	171.331.500,00	99.72%	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	175.442.184,00	175.195.000,00	99.86%	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.157.608.889,00	1.142.421.800,00	98.69%	Jumlah Utilitas dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang direhabilitasi.
Pengadaan Mebel Sekolah	516.665.514,00	513.630.000,00	99.41%	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	50.000.000,00	44.215.000,00	88.43%	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	227.700.000,00	221.920.000,00	97.46%	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.804,00	199.664.050,00	99.83%	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.476.000.000,00	1.474.500.000,00	100.00%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	148.782.378,00	128.013.950,00	86.04%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	833.000.000,00	823.141.900,00	98.82%	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.916.000.000,00	16.565.141.128,00	97.92%	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	73.798.050,00	73.80%	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	40.000.000,00	39.931.800,00	99.83%	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
Pembangunan Ruang Kelas Baru	315.000.000,00	314.875.000,00	99.96%	

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.648.594.660,00	9.486.332.714,00	96.87%	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI
Pembangunan Saran, Prasarana dan Utilitas PAUD	375.000.000,00	370.101.531,00	98.69%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	930.000.000,00	927.096.269,00	102.58%	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi
Pengadaan Mebel PAUD	175.000.000,00	174.499.900,00	99.71%	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
Pengadaan Perlengkapan PAUD	400.000.000,00	394.862.000,00	98.72%	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	400.000.000,00	395.956.800,00	98.99%	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	140.000.000,00	139.740.000,00	99.81%	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	100.00%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	57.478.000,00	53.123.834,00	92.42%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	620.718.660,00	600.563.500,00	96.75%	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.371.600.000,00	4.299.897.000,00	94.56%	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	249.798.000,00	202.419.830,00	81.03%	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.000.000,00	19.776.000,00	98.88%	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	145.000.000,00	144.296.050,00	99.51%	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1.498.709.000,00	1.343.396.037,00	78.10%	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendd Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.000.000,00	120.000.000,00	100.00%	Jumlh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.092.000,00	67.827.837,00	83.64%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	27.017.000,00	26.848.200,00	99.38%	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.227.600.000,00	1.126.600.000,00	77.69%	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	43.000.000,00	2.120.000,00	4.93%	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
Program Pengembangan Kurikulum	65.458.900,00	65.128.900,00	99.50%	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.458.900,00	65.128.900,00	99.50%	Jumlah Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Penyusunan model-model pembelajaran Inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.458.900,00	65.128.900,00	99.50%	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	492.491.300,00	471.439.182,00	97.91%	Persentase pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dalam Perencanaan Manajemen Sekolah
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	492.491.300,00	471.439.182,00	97.91%	Rasio Penghitungan dan Pemetaan /Penetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	492.491.300,00	471.439.182,00	97.91%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Program Pengembangan Kebudayaan	2.003.862.778,00	1.990.113.458,00	99.31%	Rasio Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.276.004,00	57.184.939,00	99.84%	Jumlah SDM dan Lembaga tradisi budaya tradisonal yang dibina
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	57.276.004,00	57.184.939,00	99.84%	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	1.625.586.774,00	1.613.095.753,00	99.23%	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	445.000.000,00	442.049.287,00	99.34%	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Tradisional.	1.120.631.600,00	1.112.992.436,00	99.32%	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	59.955.174,00	58.054.030,00	96.83%	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	321.000.000,00	319.832.766,00	99.64%	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	321.000.000,00	319.832.766,00	99.64%	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	200.000.000,00	199.566.325,00	99.78%	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunnya
Pembinaa Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.566.325,00	99.78%	Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	200.000.000,00	199.566.325,00	99.78%	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
Program Pembinaan Sejarah	70.000.000,00	69.460.100,00	99.23%	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum dan Situs Bersejarah
Pembinaan Sejarah Lokal dalam dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.460.100,00	99.23%	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	70.000.000,00	69.460.100,00	99.23%	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.	233.600.000,00	230.857.524,00	98.93%	Persentase Penerapan Kebijakan Perlindungan Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	190.820.000,00	190.166.524,00	99.79%	Persentase Terkelolanya Cagar Budaya Kabupaten Padang Pariaman
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	140.890.000,00		99.71%	

			140.236.924,00		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
	Penetapan Cagar Budaya	49.930.000,00	49.929.600,00	100.00%	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	42.780.000,00	40.691.000,00	95.12%	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan dan pelestarian
	Pelindungan Cagar Budaya	42.780.000,00	40.691.000,00	95.12%	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 2 urusan yaitu urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 8 program, 20 kegiatan, 80 Subkegiatan untuk tahun anggaran 2024.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 559.852.102.045,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp. 584.540.310.334,48 Dengan rumus diatas diperoleh 4,2% dikarenakan APBD hanya menyediakan anggaran sebesar 559.852.102.045,00. Sementara Pada tahun 2023 diperoleh efisiensi sebesar 7,4% dengan realisasi biaya untuk semua program Rp. 499.082.995.936 dengan target biaya Rp. 538.804.114.590

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan umumnya terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, Sementara untuk efisiensi waktu tidak terlalu mengalami efisiensi dari yang di targetkan 12 bulan dan terlaksana juga sebanyak 12 bulan. Program sudah berjalan dengan cukup baik,tetapi belum sepenuhnya optimal,masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi atau penyesuaian strategis agar tercapai 100 %.Jika ingin meningkatkan efisiensi,bisa dilakukan dengan optimalisasi anggaran peningkatan efektivitas program atau perbaikan manajemen sumber daya.

D.INOVASI

1. Inovasi RAMPAK (Ramah Lingkungan dan Peduli anak)

RAMPAK atau Ramah Lingkungan dan peduli anak adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang mana inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak. Dimana anak merasa nyaman berada di sekolah yang bisa membuat anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta lingkungan yang mendukung untuk bermain.

RAMPAK diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak yakni berupa sekolah memfasilitasi sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak, sekolah membuat pojok literasi tempat bermain anak yang rindang dan sesuai dengan kebutuhan anak serta menunjang untuk pembelajaran anak sesuai usianya dan juga untuk bermain sehingga, mereka bisa belajar sambil bermain. Tentu! Ada beberapa ide yang bisa Anda pertimbangkan untuk merancang inovasi yang ramah lingkungan dan peduli anak di sekolah seperti: - Adanya Taman Sekolah Berkelanjutan: Ubah area terbuka di sekolah menjadi taman hijau yang berkelanjutan. Gunakan teknik permaculture untuk menanam berbagai jenis tanaman yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Selain itu, gunakan teknologi seperti irigasi tetes dan penggunaan energi surya untuk memastikan taman tersebut berkelanjutan.



Foto 3.9

Ket : Kegiatan inovasi Rampak

2. INOVASI GERAKAN MILITER "mengimplementasikan literasi"

Gerakan militer gerakan "mengimplementasikan literasi" adalah meningkatkan kemampuan membaca dan menulis berpikir kritis peningkatan prestasi akademik korelasi dengan mata pelajaran lain, pengembangan karakter dan produk budi pekerti peningkatan kreativitas dan imajinasi stimuli kreativitas membaca buku cerita novel dan literatur lainnya yang dapat merangsang imajinasi dan kreativitas peserta didik.

Persiapan untuk kehidupan di masa depan dan keterampilan hidup belakang inovasi gerakan militer atau gerakan mungkin fermentasikan literasi merupakan jenis Inovasi yang diluncurkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan budaya literasi pada Peserta Didik.



Foto 3.10

Ket : Kegiatan Inovasi gerakan mmiliter

3. INOVASI UPAYA PRIMA

Upaya Prima merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk upaya pelestarian budaya daerah otoritas utama yang dilakukan oleh satuan pendidikan di PAUD SD SMP , beberapa landasan hukum undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi pasal 32 ayat 1 Pasal 21 ayat 2 seterusnya undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang meliputi pasal 1 ayat 1 Pasal 15 pasal 27 peraturan daerah di samping itu setiap daerah juga memiliki peraturan daerah Perda tentang kebudayaan yang memuat ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian budaya daerah contoh inovasi pelestarian budaya daerah berikut adalah beberapa contoh inovasi pelestarian budaya daerah yang telah dilakukan di Indonesia untuk menarik minat generasi muda pemanfaatan teknologi digital seperti melalui media sosial website dan aplikasi pembentukan komunitas budaya untuk melestarikan tradisi dan kearifan lokal libasan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya daerah seperti melalui program edukasi dan pelatihan jadi inovasi dalam pelestarian budaya daerah tetang penting untuk menjaga kelestarian bangsa budaya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. landasan hukum yang kuat telah tersedia untuk mendukung upaya-upaya inovatif tersebut dengan kreativitas dan kerjasama dari semua pihak diharapkan budaya daerah di Indonesia dapat terus berkembang pelestarian budaya daerah itu sendiri yaitu yang pertama melestarikan warisan budaya barat Budaya daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.



Foto 3.11
Ket : Kegiatan Inovasi upaya prima

4. INOVASI SIRATU BACA

Tingkat literasi dan Numerasi siswa Satuan Pendidikan SD dan SMP tergolong rendah. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya literasi dan Numerasi Siswa, salah satunya yaitu minimnya fasilitas tempat literasi dan Numerasi di sekolah. Praktek literasi dan Numerasi, merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat literasi Numerasi siswa. Literasi dan Numerasi yang dibudayakan setiap hari akan membuat minat baca dan hitung siswa meningkat.

Dengan begitu frekuensi siswa untuk membiasakan Gerakan Implementasi Literasi dan Numerasi akan lebih baik dan lebih berkualitas. Lahirnya inovasi ini merupakan pembiasaan praktek baik siswa melalui implementasi Literasi. Hal ini akan sulit terwujud tanpa melibatkan pihak-pihak yang lebih dekat berinteraksi dengan siswa, sesuai dengan pengamatan Gerakan Mengimplementasikan Literasi ini hanya mengandalkan apa yang didapatkan siswa di sekolah saja. Latar Belakang Inovasi Gerakan Mengimplementasikan literasi dan Numerasi adalah:

- a. Dikalangan siswa masih banyak ditemukan, siswa yang sibuk dengan Game online. Dan malas untuk membaca buku dan belajar sendiri untuk berhitung. Sehingga prestasinya menurun dan siswa miskin dengan pengetahuan.
- b. Banyak siswa yang minat literasi dan Numerasinya masih kurang.

c. Banyak siswa yang kebingungan dan malas saat di ajak masuk ke perpustakaan

Inovasi Siratubaca ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penerapan budaya positif pembiasaan literasi dan Numerasi siswa
- b. Sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai pentingnya membaca dan berhitung kepada siswa.
- c. Diharapkan siswa mampu melaksanakan pembiasaan literasi dan Numerasi secara continue dan nyata setiap hari.



Foto 3.12

Ket : Kegiatan Inovasi Siratu Baca

5. INOVASI CETAR MEMBAHAN (Cerdas Tanggap dan Responsif Membrantas Bahaya Narkolema)

Pengertian CETAR MEMBAHAN atau Cerdas Tanggap Membasmi Bahaya Narkolema adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang mana inovasi ini bertujuan untuk membersihkan siswa dari bahaya NARKOLEMA. (Narkoba Lewat Mata) Apa itu Narkolema? Narkolema kepanjangan dari Narkotika Lewat Mata alias pornografi. Narkolema adalah pornografi yang kita lihat baik gambar, alur cerita, foto, maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Di sebut narkotika lewat mata karena pornografi membuat seseorang itu kecanduan seperti dampak menggunakan narkoba dan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan mental serta kerusakan bagian otak. CETAR MEMBAHAN diselenggarakan dengan maksud untuk menjauhkan dan memberantas bahaya NARKOLEMA peserta didik dari yang sangat fatal yakni berupa kerusakan mental dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan otak bagian depan. Menurut American Psychological (2005) ada 7 level atau derajat orang yang ketergantungan terhadap pornografi. Level 1, apabila dalam satu tahun terpapar 1 – 2 kali pornografi dengan paparan

yang ringan. Contohnya saat kita hendak membrowsing sesuatu namun yang muncul lintasan-lintasan iklan yang berbau pornografi dan kita melihatnya. Level 2, dalam satu tahun terpapar 2 – 6 kali terpapar pornografi dan dengan fantasi yang ringan. Level 3, tiap bulan sudah terpapar pornografi dan sudah mulai ada rasa bersalah dalam hati. Level 4, biasanya sudah mengganggu pekerjaan sehari-hari. Orang yang terpapar di level 4 biasanya dalam satu bulan bisa melakukan beberapa kali mengakses situs pornografi. Level 5, hampir tiap minggu sudah terpapar pornografi dan sudah ada efek – efek gejala penurunan fungsi PFC pada otak. Seperti seseorang berada di level 5 ini biasanya sudah tidak logis, mudah marah bila di peringati, tidak sabaran, lebih suka menyendiri atau mengunci diri, turunnya daya ingat dan konsentrasi, kurang berempati/ melupakan pekerjaan baik-baik. Level 6, hari-harinya sudah menonton pornografi. Bercandaannya, gaya bicaranya semuanya di kait-kaitkan dengan pornografi. Sudah mulai menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Level 7, orang yang berada di level 7 merasa putus asa jika tidak melihat pornografi atau konten-konten yang berbau pornografi. Dampak narkolema ini tidak bisa di anggap ringan karena jika seseorang sudah kecanduan pornografi dapat merusak 5 bagian otak terutama bagian otak PFC (pre frontal cortex) bagian otak ini berada di paling depan otak manusia dekat tulang dahi.

Tujuan dari Inovasi CETAR MEMBAHANA ini adalah :

- a. untuk menjauhkan dan memberantas peserta didik dari bahaya NARKOLEMA
- b. Sebagai langkah untuk menanamkan pemahaman pada peserta didik bahwa narkolema sangat berbahaya.
- c. Diharapkan siswa mampu menjaga dirinya dari pengaruh narkolema dengan menyibukkan dirinya dengan kegiatan kegiatan yang bermanfaat
- d. Siswa mampu mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya tanpa adanya gangguan narkolema



6. INOVASI BELAFREND

Pembelajaran Berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan kekuatan yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa.



Foto 3.13

Ket : Kegiatan Inovasi Belafrend

7. INOVASI Siswa Bersih dari Narkoba (BERSINAR): Upaya Bersama Selamatkan Generasi Muda

Gerakan siswa bersih dari narkoba merupakan inisiatif yang sangat penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga siswa itu sendiri.



8. INOVASI PROPELA "Profil Projek Pelajar Pancasila"

Pengertian PROPELA atau Penguatan Profil Profil Pelajar Pancasila adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Apa itu Proppela? Proppela kepanjangan dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah program pemerintah dalam implementasi Kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik mengembangkan segala kemampuannya melalui proyek keterlibatannya langsung dengan persoalan disekitarnya. Maksud Penyelenggaraan PROPELA Penyelenggaraan PROPELA (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.



Foto 3.14

Ket : kegiatan penampilan tari siswa

9. INOVASI SIMPATIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merombak banyak aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Inovasi pembelajaran berbasis TIK terus berkembang pesat, menawarkan pendekatan yang lebih menarik, interaktif, dan efektif dalam proses belajar-mengajar.

Inovasi daerah SIMPATIK (Simak Pelajari Pembelajaran Berbasis TIK) adalah langkah yang menarik untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut.



Foto 3.15
Ket : Kegiatan siswa sedang belajar TIK

10. INOVASI LEKAT GUNA (Lebih Dekat dengan Lagu Nasional)

Inovasi lekat guna (lebih dekat dengan lagu nasional) merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk menggalakan lagi nasionalisme kepada murid di PAUD SD dan SMP. Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang inovasi antara lain undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang pada pasal 27 ayat 3 serta pasal 33 ayat 3 undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional inovasi, lagu nasional meskipun lagu nasional dapat dikaitkan dengan semangat inovasi seperti Indonesia Raya, lagu ini membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa lagu ini menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, serta lagu Bangun Pemuda Pemudi lagu ini mendorong para pemuda untuk berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa.



Foto 3.16

Ket : Kegiatan lomba paduan suara siswa SD

11. Inovasi SIMPELS (Sikap Peduli Lingkungan Sekolah)

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Pendidikan SD dan SMP masih tergolong rendah. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah, salah satunya yaitu minimnya kepedulian masyarakat disekolah. Simpels merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Simpels memberikan kesadaran terhadap kepedulian masyarakat untuk selalu peduli terhadap di mana saja berada. Dengan begitu siswa untuk terbiasa hidup tertib dan disiplin di mana saja berada serta menerapkan budaya positif

Lahirnya inovasi ini merupakan pembiasaan mulai dari praktek kepedulian masyarakat dan memberikan perhatian kepada siswa setiap hari, akan sulit terwujud tanpa melibatkan pihak pihak yang lebih dekat berinteraksi dengan siswa, sesuai dengan pengamatan pembiasaan menjaga kepedulian masyarakat ini hanya mengandalkan apa yang dilakukan siswa disekolah saja. Latar Belakang Inovasi Simpels ini adalah : a. Dikalangan siswa masih banyak ditemukan, yang kepeduliannya terhadap sekolah itu kurang. b. Banyak siswa suka cabut dan bahkan ada yang tidak sampai ke sekolah. c. Banyak siswa belum memiliki budaya positif di sekolah.



Foto 3.17

Ket : Hasil Kerajinan siswa hasil daur ulang

12. INOVASI JUMPA BERLIAN (Jumat Pagi Bersih Lingkungan)

Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman ” jumpa berlian” Jumat pagi bersihkan lingkungan jumpa berliannya yaitu jumat pagi bersihkan lingkungan, inovasi ini merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk berupaya menggalakkan kebersihan di Jumat pagi pada murid PAUD SD dan SMP agar terbiasa untuk hidup bersih dan sehat.

inovasi daerah berikut pernyataan dan klasifikasi sampah melakukan pemetaan dan klasifikasi sampah sampai di setiap wilayah untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang tepat pendekatan edukasi dan kreatif mengembangkan materi edukasi yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan minat Masyarakat khususnya anak-anak dan menjaga kebersihan lingkungan.



Foto 3.18

Ket : Goro atau kegiatan jumat bersih di satuan pendidikan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas maupun kualitas sangat terbatas. Dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pada pencapaian kinerja di tahun 2024 ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan LAKIP Tahun 2024 yaitu terkendala dalam pengumpulan data, pencatatan, pelaporan dan evaluasi kinerja dari masing-masing bidang terkait

B. LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Penyediaan Dana Operasional TK Pembina Kecamatan dan TK Pembina Kabupaten, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang PAUD dan Pendidikan Non formal yang akan menarik minat siswa maupun orang tua murid agar anak usia 4-6 Tahun dapat mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini.]
2. Serta tetap dapat melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA agar dapat meningkatkan APK SD maupun SMP. Serta dapat mengurangi angka putus sekolah untuk dapat menambah kegiatan dananya.
3. Dari segi hal Jumlah siswa SD/SMP agar mendapatkan prestasi lebih baik, baik tingkat Kabupaten, tingkat provinsi maupun Nasional. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap dapat menganggarkan bahkan menambah anggaran kegiatan baik yang bersifat kabupaten, provinsi maupun Nasional, berupa olimpiade-olimpiade maupun festival. Yang nantinya akan membawa nama Kab. Padang Pariaman ke depannya.
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas seni tradisional, budaya daerah, cagar budaya dan kepurbakalaan tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah

menyiapkan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan perlombaan pidato adat, pelatihan seni anak sekolah, fasilitasi bundo kanduang, LKAAM, pemeliharaan benda dan bangunan situs cagar budaya, pembuatan laga-laga medan nan bapaneh, pembinaan kesenian tradisional, pendataan nilai sejarah dan tradisi, bimbingan teknis sejarah dan tradisi, serta dokumentasi digitalisasi fasilitasi pembinaan sanggar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menambah anggaran pada tahun mendatang, tapi anggaran yang tersedia kena rasionalisasi anggaran Pilkada Serentak.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Terimakasih

Parit Malintang, 10 Februari 2024
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman**



Drs. Anwar, M.Si
NIP. 19670210198903 1 007